

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 30 September 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2021	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,000,000	6,000,000
Jumlah Pendapatan	6,000,000	6,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	19,301,502,000	19,301,502,000
Belanja Barang	3,195,947,000	3,195,607,000
Belanja Modal	71,000,000	71,000,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	22,568,449,000	22,568,109,000

Realisasi Pendapatan
Rp53,786,950

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp53,786,950 atau mencapai 896.45 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6,000,000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Bengkulu terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp53,786,950 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,000,000	53,786,950	896
Jumlah	6,000,000	53,786,950	896

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 185.85 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	53,786,950	18,816,809	185.85
Jumlah	53,786,950	18,816,809	185.85

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp53,786,950

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp53,786,950 dan Rp18,816,809. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 185.85 dari TA 2020 karena adanya Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang merupakan Denda atas pelaksanaan Kontrak Sewa Mesin Fotocopy karena adanya Adendum Kontrak terhadap keterlambatan pengiriman barang. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	53,786,950	18,816,809	185.85
Jumlah	53,786,950	18,816,809	185.85

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBP Lainnya Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17,910,450	12,816,810	39.74
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35,876,500	-	-
Jumlah	53,786,950	18,816,809	185.85

Realisasi Belanja
Rp15,262,277,343

B.2 Belanja

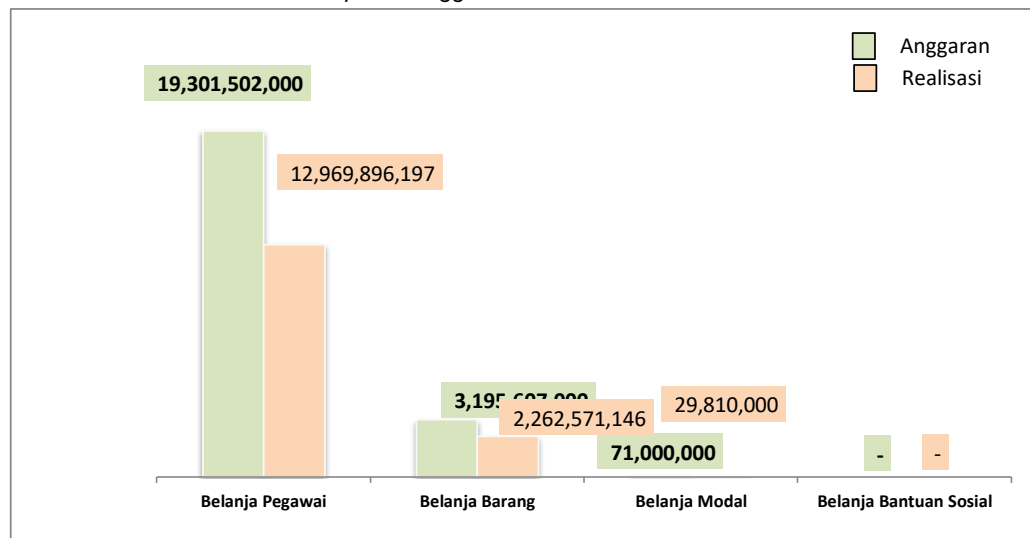
Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp15,262,277,343 atau 67.63 % dari anggaran belanja sebesar Rp.22,568,109,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2021

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	19,301,502,000	12,969,896,197	67.20
Belanja Barang	3,195,607,000	2,262,571,146	70.80
Belanja Modal	71,000,000	29,810,000	41.99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	22,568,109,000	15,262,277,343	67.63

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 15.22% karena banyak Hakim Tinggi yang mutasi ke Wilayah lain sehingga menyebabkan menurunnya realisasi Belanja Modal Pegawai dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya. Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Pegawai	12,969,896,197	15,973,282,447	(18.80)
Belanja Barang	2,262,571,146	2,003,061,084	12.96
Belanja Modal	29,810,000	25,000,000	19.24
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	15,262,277,343	18,001,343,531	(15.22)

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12,969,896,197 dan Rp15,973,282,447. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami penurunan sebesar 18.80 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan karena banyak Hakim Tinggi yang mutasi ke Wilayah lain sehingga menyebabkan menurunnya realisasi Belanja Modal Pegawai dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Pegawai Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3,377,694,200	3,779,263,140	(10.63)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	39,073	42,134	(7.26)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	281,084,130	311,847,760	(9.86)
Belanja Tunj. Anak PNS	40,931,672	51,556,994	(20.61)
Belanja Tunj. Struktural PNS	73,755,000	72,495,000	1.74
Belanja Tunj. Fungsional PNS	6,591,060,000	8,836,375,000	(25.41)
Belanja Tunj. PPh PNS	1,377,926,860	1,697,580,478	(18.83)
Belanja Tunj. Beras PNS	139,879,620	131,203,980	6.61
Belanja Uang Makan PNS	381,441,000	447,294,000	(14.72)
Belanja Tunjangan Umum PNS	41,255,000	43,495,000	(5.15)
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	666,200,000	612,000,000	8.86
Jumlah Belanja kotor	12,971,266,555	15,983,153,486	(18.84)
Pengembalian Belanja Pegawai	1,370,358	9,871,039	(86.12)
Jumlah Belanja	12,969,896,197	15,973,282,447	(18.80)

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2,262,571,146 dan Rp2,003,061,084. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 12.96% dari Realisasi TA 2020.

Hal ini antara lain disebabkan oleh karena meningkatnya realisasi Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dalam Negeri jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Barang Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional	484,482,428	511,707,136	(5.32)
Belanja Barang Non Operasional	14,025,000	19,482,000	(28.01)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57,678,205	73,204,730	(21.21)
Belanja Jasa	1,044,874,592	1,017,688,570	2.67
Belanja Pemeliharaan	390,484,118	242,689,101	60.90
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	271,590,883	138,289,547	96.39
Jumlah Belanja Kotor	2,263,135,226	2,003,061,084	12.98
Pengembalian Belanja	564,080	-	-
Jumlah Belanja	2,262,571,146	2,003,061,084	12.96

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29,810,000 dan Rp25,000,000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 19.24% dibandingkan TA 2020 disebabkan oleh karena adanya peningkatan anggaran untuk Belanja Modal pada periode TA 2021 ini.

Perbandingan Belanja Modal Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,810,000	25,000,000	19.24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	29,810,000	25,000,000	19.24
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	29,810,000	25,000,000	19.24

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2021 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh karena tidak terdapat Belanja Modal Tanah yang dapat dijabarkan pada periode Triwulan III TA 2021 maupun Tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp29,810,000 dan Rp25,000,000, mengalami kenaikan sebesar 19.24 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya alokasi anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada periode TA

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,810,000	25,000,000	19.24
Jumlah Belanja Kotor	29,810,000	25,000,000	19.24
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	29,810,000	25,000,000	19.24

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2020. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari (tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada periode Triwulan III TA 2021 maupun Tahun sebelumnya).

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan (tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada periode Triwulan III TA 2021 maupun Tahun sebelumnya).

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan (tidak terdapat Belanja Modal Lainnya pada periode Triwulan III TA 2021 maupun Tahun sebelumnya).

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja
Bantuan Sosial Rp0

B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2021 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2020. Belanja Bantuan Sosial tidak terdapat pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada periode Triwulan III TA 2021 maupun Tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran yang dapat dijabarkan pada Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu periode Triwulan III TA 2021 ini.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp60,000,000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.60,000,000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Triwulan III TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Uang Muka Kerja	60,000,000	-
Jumlah	60,000,000	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Adalah Uang Muka Kerja dari KPPN yang terdiri dari Uang Persediaan

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Triwulan III TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan pada periode Triwulan III TA 2021 maupun periode yang sama pada Tahun sebelumnya.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Triwulan III TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Tidak terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas pada periode Triwulan III TA 2021 maupun periode yang sama pada Tahun sebelumnya.

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Triwulan III TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Tidak terdapat Belanja Dibayar Dimuka pada periode Triwulan III TA 2021 maupun periode yang sama pada Tahun sebelumnya

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 30 September 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Triwulan III TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Uang Muka Belanja pada periode Triwulan III TA 2021 maupun periode yang sama pada Tahun sebelumnya

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Triwulan III TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.7 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Triwulan III TA 2021 dan 2020

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Triwulan III TA 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Triwulan III TA 2021 dan 2020

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Triwulan III TA 2021 dan 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Triwulan III TA 2021 dan 2020

Jenis	TAHUN 2021	TAHUN 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Triwulan III TA 2021 dan 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.13 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp28,684,275 dan Rp37,058,780. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Triwulan III TA 2021 dan 2020

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Barang Konsumsi	24,510,000	28,377,600
Bahan untuk Pemeliharaan	4,174,275	8,681,180
Jumlah	28,684,275	37,058,780

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik

C.14 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp-189,500 dan Rp0.

C.4 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 September 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 September 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Triwulan III TA 2021 dan 2020

Debitur	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 September 2021 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Triwulan III TA 2021 dan 2020

Debitur	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Triwulan III TA 2021 dan 2020

U R A I A N	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 September 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 September 2021 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Triwulan III TA 2021 dan 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp28,332,813,000

C.19 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 September 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp28,332,813,000 dan Rp28,332,813,000. Nilai Tanah tersebut tidak mengalami kenaikan pada periode laporan Triwulan III TA 2021 ini dibandingkan periode yang sama pada Tahun sebelumnya. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	28,332,813,000
Mutasi tambah :	
	-
Mutasi kurang :	
	-
	-
Saldo per 30 September 2021	28,332,813,000

Rincian saldo Tanah per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Triwulan III TA 2021

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1,195	Jln. Seruni Kota Bengkulu	491,231,000
2	2,010	Jln. Batang Hari Kota Bengkulu	904,886,000
3	1,933	Jln. Basuki Rahmat Kota Bengkulu	4,747,422,000
4	586	Jln. Basuki Rahmat Kota Bengkulu	1,480,378,000
-	-	-	-
Jumlah			28,334,813,000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak terdapat Tanah yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga pada Pengadilan Tinggi Bengkulu

Tanah Belum Diregister
Rp0

C.20 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 30 September 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp4,460,067,168

C.21 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp4,460,067,168 dan Rp4,416,479,668. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	4,416,479,668
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	3,204,000
	-
Saldo per 30 September 2021	4,413,275,668
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2021	(4,042,543,908)
Nilai Buku per 30 September 2021	370,731,760

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Tidak terdapat Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Penghentian Aset dari Penggunaan berupa 1 Unit Sepeda Motor

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp9,498,083,000

C.23 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9,498,083,000 dan Rp9,498,083,000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	9,498,083,000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 September 2021	9,498,083,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2021	(2,878,656,104)
Nilai Buku per 30 September 2021	6,619,426,896

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak terdapat mutasi tambah Gedung dan Bangunan pada periode Triwulan III TA 2021 ini

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak terdapat mutasi kurang Gedung dan Bangunan pada periode Semester I TA

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak terdapat aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada satker Pengadilan Tinggi

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak terdapat mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp28,680,950

C.27 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp.28,680,950 dan Rp.28,490,950. Aset tetap tersebut Berupa koleksi buku-buku (Monografi) yang terdapat di perpustakaan Pengadilan Tinggi Bengkulu. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	28,490,950
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 30 September 2021	28,490,950
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2021	-
Nilai Buku per 30 September 2021	28,490,950

Mutasi tambah/kurang:

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang Aset Tetap Lainnya pada periode Triwulan III TA 2021
Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan di satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada periode Triwulan III TA 2021. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 September 2021	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp6,921,200,012

C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp6,921,200,012 dan Rp6,547,752,965. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Triwulan III Tahun 2021

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,460,067,168	(4,042,543,908)	417,523,260
2	Gedung dan Bangunan	9,498,083,000	(2,878,656,104)	6,619,426,896
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	28,680,950	-	28,680,950
Akumulasi Penyusutan		13,986,831,118	(6,921,200,012)	7,065,631,106

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada tidak terdapat Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pengadilan Tinggi Bengkulu periode Triwulan III TA 2021 ini. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Triwulan III Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
-	-	-
Jumlah		-

Aset Tak Berwujud Rp0

C.32 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 30 September 2021	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 September 2021	-
Nilai Buku per 30 September 2021	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- Tidak terdapat mutasi tambah/kurang Aset Tak Berwujud yang dapat dijabarkan pada

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. tidak terdapat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan yang dapat dijabarkan pada periode Triwulan III TA 2021 ini.. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-

Aset Lain-lain
Rp3,204,000

C.34 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp3,204,000 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3,204,000
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo Akhir	3,204,000
Saldo per 30 September 2021	-
Akumulasi Penyusutan 30 September 2021	(3,204,000)
Nilai Buku per 30 September 2021	(3,204,000)

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Aset Tetap yang Dihentikan Penggunaannya yaitu berupa 1 Unit Sepeda Motor

Mutasi Kurang

- Tidak terdapat mutasi kurang Aset Lainnya pada periode Triwulan III TA 2021

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 3,204,000

C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp3,204,000 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	3,204,000	(3,204,000)	-
Total	3,204,000	(3,204,000)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.37 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp13,146,197. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	913,410
	-	-
Total	-	913,410

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Tidak terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga yang perlu dijabarkan dalam Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu periode Triwulan III TA 2021

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Tidak terdapat Rincian Utang yang Belum Ditagihkan pada periode Triwulan III TA 2021.

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.39 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Tidak terdapat Hibah yang Belum Disahkan pada periode Triwulan III TA 2021.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Tidak terdapat Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan di periode Triwulan III TA 2021.

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0

C.41 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2020
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Tidak terdapat Pendapatan Diterima Dimuka pada periode Triwulan III TA 2021.

Uang Muka dari KPPN
Rp60,000,000

C.42 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp60,000,000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	60,000,000
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	60,000,000

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Adalah Uang Muka Kerja berupa Uang Persediaan dari KPPN

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya yang dapat dijabarkan pada periode Triwulan III TA 2021 ini.

Ekuitas
Rp35,426,938,881

C.44 Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp35,426,938,881. dan Rp35,752,026,236. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 45 Catatan Penting Lainnya neraca

Persediaan yang Belum Diregister senilai -Rp189.500 adalah merupakan Belanja Barang Persediaan Konsumsi yang sudah dicatat di aplikasi Persediaan satker Pengadilan Tinggi Bengkulu tetapi baru dipertanggungjawabkan di Bulan Oktober 2021.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp53,786,950

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp53,786,950 dan Rp12,816,810. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 319.66. Hal tersebut disebabkan oleh adanya Pendapatan Sewa Rumah Dinas dan Pendapatan atas Denda Penyelesaian Kontrak Sewa Mesin Fotocopy. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	17,910,450	12,816,810.00	39.74
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	35,876,500	-	-
	-	-	-
Jumlah	53,786,950.00	12,816,810.00	319.66

Beban Pegawai
Rp12,968,982,787

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12,968,982,787 dan Rp15,970,761,895.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar 18.80 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh karena di Tahun 2021 banyak Hakim Tinggi yang mutasi ke Wilayah lain sehingga menyebabkan menurunnya realisasi Belanja Pegawai. Rincian Beban Pegawai Triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Gaji Pokok PNS	3,377,497,500	3,771,681,040	(10.45)
Beban Pembulatan Gaji PNS	38,675	41,825	(7.53)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	281,064,460	309,559,130	(9.20)
Beban Tunj. Anak PNS	40,931,672	51,556,994	(20.61)
Beban Tunj. Struktural PNS	73,755,000	71,730,000	2.82
Beban Tunj. Fungsional PNS	6,590,790,000	8,835,150,000	(25.40)
Beban Tunj. PPh PNS	1,377,926,860	1,697,049,926	(18.80)
Beban Tunj. Beras PNS	139,879,620	131,203,980	6.61
Beban Uang Makan PNS	380,744,000	447,294,000	(14.88)
Beban Tunjangan Umum PNS	40,155,000	43,495,000	(7.68)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	666,200,000	612,000,000	8.86
	-	-	-
Jumlah	12,968,982,787	15,970,761,895	(18.80)

Beban Persediaan
Rp52,261,600

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp52,261,600 dan Rp39,233,450

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 33.21 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh karena meningkatnya permintaan terhadap persediaan barang konsumsi pada periode Triwulan III TA 2021 ini dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan konsumsi	52,261,600	39,233,450	33.21
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	52,261,600.00	39,233,450	33.21

Beban Barang dan Jasa
Rp1,530,585,233

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,530,585,233 dan Rp1,534,502,871.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.26 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh karena menurunnya realisasi Belanja Jasa pada periode Triwulan III TA 2021 ini dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Keperluan Perkantoran	283,978,043	318,347,721	(10.80)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,176,500	12,077,300	0.82
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51,580,000	53,650,000	(3.86)
Beban Barang Operasional Lainnya	126,214,885	113,828,695	10.88
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9,969,000	7,807,420	27.69
Beban Bahan	14,025,000	17,852,000	(21.44)
Beban Langganan Listrik	114,729,817	123,394,053	(7.02)
Beban Langganan Telepon	957,552	1,607,682	(40.44)
Beban Langganan Air	2,834,436	2,308,000	22.81
Jumlah	1,530,585,233	1,534,502,871.00	(0.26)

Beban Pemeliharaan
Rp404,464,648

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp404,464,648 dan Rp270,676,221.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 49.43 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh karena meningkatnya alokasi anggaran pemeliharaan pada TA 2021 serta meningkatnya realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya pada periode Triwulan III TA 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149,121,328	106,865,382	39.54
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	94,661,500	18,525,900	410.97
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146,701,210	117,297,819	25.07
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	13,980,610	27,987,120	(50.05)
	-	-	-
Jumlah	404,464,648	270,676,221	49.43

Beban Perjalanan Dinas
Rp271,590,883

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp271,590,883 dan Rp138,289,547

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 96.39 persen disebabkan oleh karena meningkatnya alokasi anggaran untuk Beban Perjalanan Dinas di Tahun 2021 dan terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis menyebabkan meningkatnya penyerapan anggaran Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada Triwulan III TA 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Perjalanan Biasa	82,870,883	43,579,547	90.16
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,550,000	3,600,000	54.17
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	183,170,000	91,110,000	101.04
	-	-	-
Jumlah	271,590,883.00	138,289,547	96.39

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh karena tidak terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada periode Triwulan III TA 2021 maupun periode yang sama pada Tahun sebelumnya. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar 0,00 disebabkan oleh karena tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada Triwulan III TA 2021 maupun periode yang sama pada Tahun sebelumnya. Rincian Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp376,651,047

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp376,651,047 dan Rp423,391,203.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	112,500,946	131,725,553	(14.59)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	264,150,101	291,665,650	(9.43)
	-	-	-
Jumah Penyusutan	376,651,047	423,391,203	(11.04)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	376,651,047	423,391,203	(11.04)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Rp0

D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5,989,999

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	5,999,999.00	(100)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	(10,000.00)	(100)
Jumlah	-	5,989,999	(100)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0

D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp546,580.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Triwulan III TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	961,320.00	(100.00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	(414,740.00)	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	546,580	(100.00)

Pos Luar Biasa Rp0

D.14 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Triwulan III 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

Tidak terdapat Pos-Pos Luar Biasa pada periode Triwulan III TA 2021.

D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional yang dapat dijabarkan pada Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada periode Triwulan III TA 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp35,752,026,236.00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.35,752,026,236.00 dan Rp.37,116,794,339.00

Defisit LO Rp.-
15,550,749,248.00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.-15,550,749,248.00 dan Rp.-18,357,501,798.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0.00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp15,225,661,893

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.15,225,661,893 dan Rp.17,982,526,722. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	15,262,277,343
Diterima dari Entitas Lain	(53,786,950)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	190,000
Pengesahan Hibah Langsung	16,981,500
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	15,225,661,893

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2021, DKEL sebesar Rp 15,262,277,343, sedangkan DDEL sebesar Rp 53,786,950

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 September 2021 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2021

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 September 2021 sebesar Rp190,000 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Monografi	Badan Urusan Administrasi	85,000
Monografi	Badan Urusan Administrasi	105,000
Jumlah		190,000

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 September 2021 adalah sebesar 16,981,500 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2021

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 September 2021 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Tety Siti Rochmat Setyawati	Hibah barang berupa 1 Unit AC Split	7,081,500
Umi Kalsum, S.Sos	Hibah barang berupa 1 Unit Printer	4,950,000
M. Ali El Fahmi	Hibah barang berupa 1 Unit Printer	4,950,000
Total Pengesahan		16,981,500.00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		16,981,500

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp35,426,938,881*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.35,426,938,881.00 dan Rp.36,741,819,263.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas yang dapat dijabarkan pada Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu periode Triwulan III TA 2021 ini.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat Kejadian-Kejadian Setelah Tanggal Neraca yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu periode Triwulan III TA 2021 ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat Pendapatan dan Belanja secara Akrua yang perlu dijelaskan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

Rekening Virtual dengan Nomor Rekening 653244005121000 A.n BPG 016 Pengadilan Tinggi Bengkulu yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.0.

Nomor Surat Ijin dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara : S-762/PB.3/2021 Tanggal 21 April 2021.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-1 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang Tanggal 21 Maret 2021
2. Revisi DIPA ke-2 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 31 Mei 2021
3. Revisi DIPA ke-3 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 2 Juli 2021
4. Revisi DIPA ke-4 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 13 Agustus 2021
5. Revisi DIPA ke-5 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 25 Agustus 2021
6. Revisi DIPA ke-6 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 14 September 2021

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai ralat SPM dapat dijabarkan sebagai berikut:

Ralat SPM Nomor 00076 tanggal 22 April 2021, SP2D Nomor 210161301005929 tanggal 26 April 2021 karena adanya kesalahan input uraian SPM

Informasi mengenai Pengembalian Belanja sebagai berikut :

1. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Akun 511124) sebesar Rp270.000,-
2. Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (Akun 815511) sebesar Rp9.496,-
3. Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (Akun 815511) sebesar Rp11.000,-
4. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah untuk Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Akun 523121) sebesar Rp.80

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Sehubungan dengan tahapan Restrukturisasi Rekening Pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga dan surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi nomor B-21/Bua.3/KU.03/4/2021 tanggal 12 April 2021 hal Permohonan Cut-off dan Pemindahbukuan, maka berkenaan dengan hal tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengajukan penutupan rekening Giro :

Nomor Rekening : 011501001585301

Nama Rekening : BPG 016 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Bank : Bank Rakyat Indonesia

Dan telah dipindahbukuan /migrasi ke rekening Virtual Account:

Nomor Rekening : 6532444005121000

Nama Rekening : BPG016 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Bank : Bank Rakyat Indonesia

pada tanggal 23 April 2021